

**MEMUPUK TANGGUNG JAWAB, MELAWAN KORUPSI:**  
SEBUAH TELAHAH ETIS-TEOLOGIS TENTANG MAKNA DAN PEMBENTUKAN  
TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KEBAJIKAN KRISTIANI UNTUK MELAWAN KORUPSI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi  
Universitas Kristen Duta Wacana

OLEH:

AUGUST CORNELES TAMAWIWY-KARUNDENG

01 09 2227

PROGRAM STUDI S-1 FAKULTAS TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA

2014

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

MEMUPUK TANGGUNG JAWAB, MELAWAN KORUPSI:  
SEBUAH TELAHAH ETIS-TEOLOGIS TENTANG MAKNA DAN PEMBENTUKAN  
TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KEBAJIKAN KRISTIANI UNTUK MELAWAN KORUPSI

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**AUGUST CORNELES TAMAWIWY-KARUNDENG**

01 09 2227

dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Sains Teologi pada tanggal 4 Agustus 2014

Nama Dosen

1. Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, M.A.P.S., Ph.D.  
(Dosen Pembimbing dan Penguji)
2. Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D.  
(Dosen Penguji)
3. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.A., M.Hum.  
(Dosen Penguji)

Tanda Tangan



Yogyakarta, 4 Agustus 2014

Disahkan oleh:

Dekan,



Pdt. Yahya Wijaya, Ph.D.



Kepala Program Studi S-1,



Pdt. Wahyu Satria Wibowo, M.A., M.Hum.

## PRAKATA

Tulisan ini muncul dari keprihatinan saya sebagai teolog sekaligus warga negara yang berada di tengah konteks korupsi di Indonesia pada abad ke-21. Media massa di Indonesia pada konteks ini, hampir setiap harinya memberitakan tentang kasus-kasus korupsi. Korupsi sudah menjadi budaya karena ketidaksadaran, atau justru karena banalitasnya di Indonesia? Kurangnya narasi-narasi yang membahas tentang korupsi di tengah perhelatan *discourse* teologi membuat saya tidak sabar mengerjakan tulisan ini. Sejak satu semester sebelum saya diberikan surat resmi untuk mulai mengerjakan skripsi, saya telah menyelesaikan proposal saya. Dua semester sebelumnya, tepatnya di tengah tugas praktek kejematan (baca: *stage*), saya sudah mendalami bahan-bahan bacaan tentang etika karakter dari Paulus Sugeng Widjaja dan beberapa bacaan dari Dietrich Bonhoeffer dan H. Richard Niebuhr. Beberapa semester sebelumnya, seingat saya di tahun kedua sejak pertama saya masuk di Teologi, saya telah jatuh hati dengan pemikiran Widjaja, Bonhoeffer dan Niebuhr. Alur persiapan inilah yang menjadi kekuatan saya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dengan nilai skripsi 91 sehingga mendapatkan predikat A dan lulus dengan predikat *cumlaude*.

Semua ini muncul mungkin karena kegeraman saya dengan korupsi. Tapi rasa cinta dan perhatian saya terhadap kaum yang tertindas akibat korupsi lebih besar sehingga membuat saya konsisten mengerjakan tulisan ini. Tidak dapat dipungkiri, setiap pengerjaan skripsi pasti menemui *cul de sac*-nya masing-masing, yang jangka waktunya mungkin berbeda namun namanya sama: kejenuhan. Rasa cinta dan keprihatinan yang besar tadi mengalahkan kejenuhan ini—di samping karena kegiatan lainnya di tengah penulisan skripsi ini.

Walaupun demikian, saya pun menghayati proses menjalani studi dan penulisan skripsi ini di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana selama 5 tahun tidak hanya sebagai sebuah perjalanan intelektual melainkan juga bagian dari peziarahan spiritual. Peziarahan tentu melalui berbagai tempat. Situasi yang saya singgahi silih berganti melalui perjumpaan dengan banyak orang. Masa persinggahan dan peziarahan selama 5 tahun ini, tentu tidak dapat dan tidak mungkin dijalani tanpa bantuan, dukungan, dan interaksi dengan banyak orang yang saya jumpai. Tidak ada hal lain, selain ungkapan syukur dan terima kasih saya kepada:

Papa dan mama, **Denny Abram Karundeng** dan **Maria Immaculata Julia Anna van Barthold-Karundeng**, atas segala bentuk dukungan dan peluh yang kalian berikan untuk kelangsungan studi saya. Terima kasih karena selalu mengingat saya di dalam doa dan harapan kalian. Kedua adik saya, **Yeremia Christian Tamawiwiy** dan **Clever Michael Angelo**

**Tamawiwiy**, terima kasih karena selalu menjadi semangat dan pengingat bagi saya untuk menjadi teladan yang baik bagi kalian berdua. Menjadi teladan bagi kalian berdua adalah sebuah awal bagi saya untuk menjadi teladan bagi orang lain. Oma saya, **Dhorthea Cornalia Tamawiwiy** yang selalu mendoakan, rindu dan bangga kepada saya. Om saya **Frederick Markus Sario Karundeng** (†) dan tante saya **Jenny Alrintje Sipora Karundeng** serta seluruh keluarga **Tamawiwiy-Karundeng** yang dengan sepenuh hati memberikan dukungan semangat bahkan biaya studi dari pertama kali saya memutuskan untuk memilih di program sarjana teologi ini.

**Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana**, karena telah bersedia menerima dan membimbing saya dalam peziarahan intelektual, ministerial dan spiritual saya. Khususnya untuk **Pdt. Paulus S. Widjaja** sebagai dosen pembimbing skripsi, dosen etika sekaligus dosen wali saya yang dengan cermat mengamati perkembangan studi saya, dengan kesabaran bersedia membaca, mengoreksi dan memberi masukan untuk skripsi ini di tengah kesibukan yang luar biasa padatnya, serta menginspirasi, mendorong dan memberi teladan tentang apa dan bagaimana cara menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus. Juga untuk **Pdt. Yahya Wijaya** sebagai salah satu dosen etika dan penguji skripsi ini bersama dengan **Pdt. Wahyu Satrio Wibowo** yang telah bersedia menjadi “rekan-rekan diskusi” baik di dalam kelas maupun pada saat ujian tanggal 4 Agustus 2014 jam 08.00 WIB di ruang D pascasarjana, memberi masukan dan mengkritisi hal-hal penting tentang isi skripsi ini. Tidak lupa untuk **Dietrich Bonhoeffer** dan **Helmut Richard Niebuhr** yang membantu saya menginspirasi makna tanggung jawab Kristiani. Pembimbing rohani saya, **Pdt. Stefanus Ch. Haryono** yang tulus mau mendengar keluh kesah dan kecemasan saya. **Pdt. Djoko Prasetyo** yang sempat meringankan beban saya dengan memasukan saya untuk menerima bantuan dana biaya hidup selama dua bulan. **Pdt. E. Gerrit Singgih** dan **Pdt. Robert Setio** yang memberi saya kesempatan menjadi *research assistant* bersama **Immanuel Geovasky**, **Widianto Nugroho** dan **Samuel Ferdianto** sehingga ada kesibukan lain di tengah kejenuhan rutinitas skripsi. Juga bagi seluruh dosen yang tidak sempat saya sebutkan namanya di sini, hatiku selalu bersyukur karena sempat bertemu, berguru dan belajar bersama dengan kalian semua.

**Seluruh Angkatan 2009** khususnya teman-teman di **Kontrakan Orange Bausasran**: **Boydo R.E.D. Hutagalung** yang menjadi partner meleburkan *virtue ethics* dengan teologi proses bahasan skripsi miliknya, serta menjadi teman satu sinode berbagi kejengahan tentangnya. **Pintoko Danang Pramudito** yang membuat saya sadar bahwa bermain dan berfantasi di waktu senggangpun adalah sesuatu yang penting. **Ivo Peranging-angin** yang selalu menggoda saya dengan wangi masakannya dari dapur setiap pagi dan menjadi tempat saya meminjam uang

ketika uang kiriman sudah tidak mencukupi lagi, tanpa bang Ivo, entah kepada siapa lagi saya harus meminjam. **Andreas M.P. Pasaka** yang menyegarkan saya dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan teologi. **Daniel Bani W.E.** yang selalu mengingatkan saya untuk selalu bersyukur di dalam setiap keadaan serta berjuang tanpa putus asa menggapai cita-cita. Juga untuk teman-teman di **kontrakan HTC: Eko Iswanto** yang tidak hanya selalu menjadi rekan bermain *rummy* (baca: remi) bersama **Agus B. Kristanto, Ivan G. Kristian,** dan **Antonius A. Nugroho,** namun juga menjadi rekan diskusi tentang Dietrich Bonhoeffer bahkan mengenalkan saya pada *appreciative inquiry approach*. Kepada **Dhaniel Rinadi** dan **Bambang Subeki,** terima kasih karena bersedia mendengar suara dengkuranku ketika ketiduran setelah bermain *rummy* bersama mereka. Terima kasih karena kalian semua telah mengisi keceriaan di tengah penulisan skripsi ini.

Terkhusus bagi kekasih saya, **Ywardhana Septiani Bulu** yang dengan ketulusan memberi semangat dalam setiap keluh kesah saya, perhatian dalam setiap kebutuhan saya, kasih yang selalu menghangatkan hati dan pikiran saya serta perjuangan dan kesabaran menghadapi protes, kritik, ego dan ambisi saya.

Di atas semuanya, ungkapan syukur bahkan seluruh hidup, saya persembahkan kepada **Kristus Sang Telos** yang telah dan akan selalu menjadi teladan dan inspirasi saya dalam menjalani hidup. Kehadiran Kristus telah memengaruhi hati dan pikiran saya seutuhnya. Walau peziarahanku begitu terjal dan perjuanganku begitu berat, namun di dalam Kristus selalu ada pengharapan.

Dengan selesainya skripsi ini, maka selesai pula program studi sarjana teologi saya di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana ini. Kiranya skripsi ini justru menjadi awal untuk peziarahan lebih lanjut bagi saya di jenjang berikutnya. Dengan demikian, maka peziarahan saya selanjutnya baru saja dimulai.

Kontrakan *Orange* Bausasran,  
Yogyakarta, Agustus 2014.

August Corneles Tamawiwiy-Karundeng

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>i</b>
<b>Prakata</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Pernyataan Integritas</b> .....	<b>viii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>ix</b>
<b>Bab I. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Malunya Jadi Orang Indonesia: Fenomena Korupsi di Indonesia .....	1
B. Tanggung Jawab Sebagai Sebuah Kebajikan .....	5
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan .....	8
E. Judul.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>Bab II. Tiga Pilar Sosiologis dan Korupsi Sebagai Persoalan Moralitas dan Etika</b> .....	<b>11</b>
A. Korupsi dan Tiga Pilar Sosiologis.....	11
1. Pilar Politik: Ancaman Hukuman Berat dan Transformasi Struktural .....	13
2. Pilar Ekonomi: Kenaikan Remunerasi.....	17
3. Pilar Budaya: Gereja Sebagai <i>Social Moral Movement</i> .....	19
B. Korupsi Sebagai Persoalan Moralitas dan Etika .....	22
C. Titik Tolak Etika Kristen: Pendekatan Etis-Teologis.....	25
<b>Bab III. Makna Tanggung Jawab Sebagai Sebuah Kebajikan</b> .....	<b>28</b>
A. Dietrich Bonhoeffer.....	28
1. Realitas Kristus .....	28
2. Etika Kristen Kontekstual.....	31
3. Peran Yesus Kristus dan Tanggung Jawab .....	33
B. Helmut Richard Niebuhr .....	36
1. Kedaulatan Allah .....	37

2. Hubungan Antara Iman Dengan Nilai .....	38
3. Peran Yesus Kristus dan Tanggung Jawab .....	41
C. Makna Tanggung Jawab dalam Konteks Korupsi di Indonesia .....	46
<b>Bab IV. Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Melawan Korupsi di Indonesia .....</b>	<b>49</b>
A. Kegagalan Gereja dalam Pembentukan Karakter .....	49
B. Pembentukan Karakter Bertanggungjawab .....	54
1. Kebajikan-kebajikan .....	55
2. <i>Telos</i> .....	63
3. Narasi .....	66
4. Praktik Sosial .....	69
<b>Bab V. Kesimpulan dan Saran Penelitian Lebih Lanjut .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan Akhir dan Kontribusi Penelitian .....	72
B. Saran Untuk Penelitian Lebih Lanjut .....	79
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

### MEMUPUK TANGGUNG JAWAB, MELAWAN KORUPSI:

SEBUAH TELAAH ETIS-TEOLOGIS TENTANG MAKNA DAN PEMBENTUKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KEBAJIKAN KRISTIANI UNTUK MELAWAN KORUPSI

Oleh: August Corneles Tamawiwu-Karundeng (01092227)

Korupsi sebagai *extraordinary crime* dan/atau *crime against humanity* di dalam konteks Indonesia bukanlah sebuah persoalan yang baru. Berbagai pendekatan untuk melawan korupsi dari pilar politik dan pilar ekonomi dilakukan namun pada kenyataannya selalu berujung pada *cul de sac*. Di pihak lain, jika mengacu pada teori tiga pilar sosiologis Nicanor Perlas maka kita melihat bahwa sebenarnya pilar budaya yang berurusan dengan nilai-nilai kehidupan dalam konteks melawan tindakan korupsi sering terlupakan. Penekanan kembali terhadap pilar budaya menyadarkan bahwa tindakan korupsi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap salah satu nilai, yaitu nilai tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani. Oleh sebab itu, makna tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani perlu kembali digali dan dikenali melalui tinjauan etis-teologis. Peninjauan secara etis-teologis tentang makna tanggung jawab dengan menimba inspirasi dari Dietrich Bonhoeffer dan Helmut Richard Niebuhr memperlihatkan bahwa makna tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani adalah kemampuan untuk dengan bebas mau mengasihi dan memiliki solidaritas dengan orang-orang yang menderita tanpa membedakan latar belakang mereka, tanpa syarat, tanpa batas, sebagai wujud dari respon manusia terhadap karya Allah di dunia. Dengan mengacu pada teori *character formation* Paulus Sugeng Widjaja, Gereja sebagai bagian dari bangsa Indonesia dituntut untuk menyatakan perannya mempersaksikan Kristus dengan cara mempelajari dan memupuk kebajikan tanggung jawab, mengorientasikan pembentukan tanggung jawab pada *telos*, meletakkan pembentukan karakter bertanggungjawab di dalam konteks narasi yang memberi makna pada karakter tanggung jawab dan melatihnya melalui praktik sosial melawan korupsi. Dengan mengupayakan pembentukan karakter bertanggungjawab, Gereja diajak untuk kembali mengenali perannya di tengah konteks korupsi di Indonesia dan melawannya.

**Kata Kunci:** Korupsi, Etika, Teologi, Nicanor Perlas, Tiga Pilar Sosiologis, Dietrich Bonhoeffer, Helmut Richard Niebuhr, Tanggung Jawab, Paulus Sugeng Widjaja, Pembentukan Karakter, Kebajikan-kebajikan, *Telos*, Narasi, Praktik Sosial.

Lain-lain:

ix + 86 hal; 2014

50 (1936 - 2014)

Dosen Pembimbing: Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, M.A.P.S., Ph.D



## PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi dengan judul: **Memupuk Tanggung Jawab, Melawan Korupsi: Sebuah Telaah Etis-Teologis Tentang Makna dan Pembentukan Tanggung Jawab Sebagai Kebajikan Kristiani Untuk Melawan Korupsi** adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan hasil karya orang lain (plagiarisme), saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 27 Juni 2014

Penyusun,



August Corneles Tamawiwu-Karundeng

*Jadi, kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani?  
Dan kalau mengenai barang yang dimiliki orang lain, kalian terbukti tidak bisa dipercayai, siapa mau memberikan kepadamu apa yang menjadi milikmu?*

(Lukas 16:11-12—BIS)

**“If we fail to challenge corruption  
we fail to love our neighbor”.**

*Noel Preston*

## ABSTRAK

### MEMUPUK TANGGUNG JAWAB, MELAWAN KORUPSI:

SEBUAH TELAAH ETIS-TEOLOGIS TENTANG MAKNA DAN PEMBENTUKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KEBAJIKAN KRISTIANI UNTUK MELAWAN KORUPSI

Oleh: August Corneles Tamawiwu-Karundeng (01092227)

Korupsi sebagai *extraordinary crime* dan/atau *crime against humanity* di dalam konteks Indonesia bukanlah sebuah persoalan yang baru. Berbagai pendekatan untuk melawan korupsi dari pilar politik dan pilar ekonomi dilakukan namun pada kenyataannya selalu berujung pada *cul de sac*. Di pihak lain, jika mengacu pada teori tiga pilar sosiologis Nicanor Perlas maka kita melihat bahwa sebenarnya pilar budaya yang berurusan dengan nilai-nilai kehidupan dalam konteks melawan tindakan korupsi sering terlupakan. Penekanan kembali terhadap pilar budaya menyadarkan bahwa tindakan korupsi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap salah satu nilai, yaitu nilai tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani. Oleh sebab itu, makna tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani perlu kembali digali dan dikenali melalui tinjauan etis-teologis. Peninjauan secara etis-teologis tentang makna tanggung jawab dengan menimba inspirasi dari Dietrich Bonhoeffer dan Helmut Richard Niebuhr memperlihatkan bahwa makna tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani adalah kemampuan untuk dengan bebas mau mengasihi dan memiliki solidaritas dengan orang-orang yang menderita tanpa membedakan latar belakang mereka, tanpa syarat, tanpa batas, sebagai wujud dari respon manusia terhadap karya Allah di dunia. Dengan mengacu pada teori *character formation* Paulus Sugeng Widjaja, Gereja sebagai bagian dari bangsa Indonesia dituntut untuk menyatakan perannya mempersaksikan Kristus dengan cara mempelajari dan memupuk kebajikan tanggung jawab, mengorientasikan pembentukan tanggung jawab pada *telos*, meletakkan pembentukan karakter bertanggungjawab di dalam konteks narasi yang memberi makna pada karakter tanggung jawab dan melatihnya melalui praktik sosial melawan korupsi. Dengan mengupayakan pembentukan karakter bertanggungjawab, Gereja diajak untuk kembali mengenali perannya di tengah konteks korupsi di Indonesia dan melawannya.

**Kata Kunci:** Korupsi, Etika, Teologi, Nicanor Perlas, Tiga Pilar Sosiologis, Dietrich Bonhoeffer, Helmut Richard Niebuhr, Tanggung Jawab, Paulus Sugeng Widjaja, Pembentukan Karakter, Kebajikan-kebajikan, *Telos*, Narasi, Praktik Sosial.

Lain-lain:

ix + 86 hal; 2014

50 (1936 - 2014)

Dosen Pembimbing: Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, M.A.P.S., Ph.D

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Malunya Jadi Orang Indonesia<sup>1</sup>: Fenomena Korupsi di Indonesia

Korupsi adalah ‘puncak krisis peradaban’ yang melumpuhkan gerak-maju bangsa.<sup>2</sup> Kesimpulan ini disampaikan oleh Tamrin Amal Tomagola di dalam pengantar tulisannya yang membedah korupsi dari sudut pandang sosiologis.<sup>3</sup> Korupsi memang sudah menjadi ‘penyakit kanker’ yang menggerogoti negara Indonesia. Menurut Alkostar, secara historis di Indonesia korupsi sudah terjadi sejak zaman VOC<sup>4</sup>, pada awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Reformasi hingga saat ini.<sup>5</sup> Sebagai sebuah fenomena, korupsi merupakan momok yang diketahui oleh setiap kalangan sosial di masyarakat Indonesia karena semakin maraknya pemberitaan mengenai kasus korupsi hampir di seluruh media (cetak maupun elektronik) masa kini.

Robert Setio di dalam tulisannya pun menyetujui hal ini.<sup>6</sup> Menurutnya, tingkat korupsi sekarang ini jauh lebih parah dibandingkan masa Orde Baru karena sekarang, korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti di masa Orde Baru melainkan dapat dilakukan oleh semua orang. Jika di zaman Orde Baru korupsi hanya dilakukan sebagian besar oleh

---

<sup>1</sup> Judul topik ini diambil dari sebuah judul bunga rampai hasil seminar di Universitas Kristen Duta Wacana dalam rangka *jubelium* (50 tahun). Judul ini juga dipakai oleh Daniel K. Listijabudi yang merupakan salah satu dari enam belas penulis di dalamnya.

<sup>2</sup> Tamrin Amal Tomagola, “Korupsi: Puncak Krisis Peradaban Bangsa, Sebuah Upaya Pembedahan Sosiologis” di dalam bunga rampai hasil seminar dalam rangka *jubelium* (50 tahun) UKDW yang disunting oleh Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana, 2012), 91.

<sup>3</sup> Ibid., 93. Tomagola menjelaskan bahwa ketika melakukan pembedahan sosiologis, ia menggunakan alat bedah analitik (*Conceptual-Analytical Tools*) dan kerangka konseptual sosiologis (*Sociological Conceptual Framework*).

<sup>4</sup> *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau di dalam bahasa Indonesia disebut Kongsi Perdagangan Hindia-Timur. Disebut Hindia-Timur karena ada juga VWC yang menguasai Hindia-Barat. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia yang dimiliki oleh Belanda ketika Belanda datang dan menjajah bangsa Indonesia. Fungsi VOC adalah memonopoli perdagangan di kawasan Asia dan mengatasi persaingan dengan negara lain.

<sup>5</sup> Artidjo Alkostar, “Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen” dalam *Jurnal Hukum UII no 1 Vol. 15* (Januari, 2008), 6.

<sup>6</sup> Robert Setio, “Sumbangan Pendidikan Kristen Bagi Perlawanan Terhadap Korupsi di Indonesia” di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya*, 225.

lembaga eksekutif<sup>7</sup> dan yudikatif<sup>8</sup>, sekarang lembaga legislatif<sup>9</sup> juga ikut ramai-ramai melakukan korupsi. Bahkan Franz Magnis-Suseno mengingatkan kita bahwa kaum *proletar*, rakyat miskin dalam hal ini bukanlah kelompok yang tidak bersalah (*innocent*) melainkan orang-orang yang sama berdosa dengan kelompok penguasa.<sup>10</sup> Bagi Magnis-Suseno, setiap upaya mempersalahkan pihak lain akan selalu berbau membenarkan diri sendiri dan dengan demikian tidak mau bertanggungjawab sendiri. Oleh karenanya, cerita tentang rakyat yang baik, menurut Magnis-Suseno juga hanyalah sebuah mitos. Magnis-Suseno mencurigai rakyat kecil sebagai mereka yang mungkin saja latah bernafsu ikut *the bandwagon* dalam hal korupsi sehingga kalau dilihat dari tingkat individual atau mikro, kita semua lebih banyak tidak bersih daripada bersih.<sup>11</sup> Walaupun demikian, Magnis-Suseno tetap mengarahkan beban fenomena ini kepada kaum elit sebagai tanggung jawab mereka. Mengapa? Karena menurutnya, pihak yang melahirkan mental korupsi sehingga mewabah kepada rakyat kecil adalah para elit. Selain itu, rakyat juga dipandang tidak mempunyai kemantapan ekonomi dan sosial untuk tidak ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh para elit.<sup>12</sup>

Bangsa yang korup menurutnya tidak dapat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berkembang walaupun sudah berusaha sekuatnya sehingga hal ini memungkinkan terjadinya *failed state*.<sup>13</sup> Selain itu, korupsi seharusnya dipandang sebagai suatu pengkhianatan terhadap manusia dan Tuhan(!). Pengkhianatan terhadap rakyat yang tidak dapat hidup dengan taraf manusiawi karena sumber kehidupan mereka dikorupsi para elit. Pengkhianatan terhadap Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada para elit untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain namun malah dipakai demi kepentingan diri sendiri. Perlu diingat bahwa 'elit' yang dimaksud oleh Magnis-Suseno adalah pemerintah, wakil rakyat, para penguasa perekonomian besar dan kecil, kaum intelektual, para tokoh masyarakat, termasuk juga para tokoh agama dan para panutan(!).<sup>14</sup>

Paulus Sugeng Widjaja dalam hal ini menyetujui Magnis-Suseno. Menurutnya, korupsi memang terjadi karena perilaku mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa memerhatikan

---

<sup>7</sup> Salah satu badan pemerintahan di Indonesia yang berfungsi menjalankan undang-undang/pemerintahan. Figur paling senior dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Republik, maka badan eksekutif ini merujuk kepada presiden yang dipilih melalui pemilu.

<sup>8</sup> Salah satu badan pemerintahan di Indonesia yang berfungsi mengadili atas terjadinya pelanggaran undang-undang/hukum.

<sup>9</sup> Salah satu badan pemerintahan di Indonesia yang berfungsi membuat undang-undang/hukum.

<sup>10</sup> Franz Magnis-Suseno, "Lumpur Korupsi dan Integritas Agama" di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya*, 7-9.

<sup>11</sup> Franz Magnis-Suseno, "Lumpur", 7.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 15-16.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 8.

kepentingan orang lain. Namun perhatian Magnis-Suseno yang menyoroiti korupsi dengan melihat faktor struktural sebagai penyebabnya menurut Widjaja kurang komprehensif. Memang faktor struktural memiliki kontribusi bagi maraknya praktik korupsi di Indonesia, namun kemungkinan solusinya menurut Widjaja tidak semata-mata terletak pada faktor-faktor eksternal saja seperti solusi-solusi perbaikan dan penegakan hukum, sistem *auditing* yang efektif, media yang investigatif serta kampanye pendidikan anti-korupsi.<sup>15</sup> Menurut Widjaja, solusi-solusi eksternal ini mereduksi rakyat Indonesia itu sendiri karena rakyat tidak didorong untuk bertumbuh menjadi agen-agen rasional karena perilaku mereka masih ditentukan oleh sistem imbalan (*reward*) dan ancaman hukuman (*punishment*); sistem dengan pola pembelajaran anak-anak kecil. Orang yang masih ditentukan oleh sistem ini disebut sebagai agen yang secara potensial rasional—yaitu kondisi ketika sikap rasional mereka tidak muncul dari kesadaran pikiran dan hati melainkan akibat stimulus eksternal—bukan secara aktual rasional yang setiap tindakannya merupakan aksi refleksi dari kesadaran pribadi, stimulus internal, bukan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi yang mengubah dari dalam moralitas individu dan komunitas. Usaha ini disebutnya sebagai *transformasi internal*.<sup>16</sup>

Dari kedua pendapat ini, saya melihat bahwa ada perbedaan jenis korupsi yang sebenarnya diutarakan. Jika Magnis-Suseno membicarakan yang disebut Widjaja sebagai solusi eksternal, hal itu dikarenakan apa yang dibahas Magnis-Suseno merupakan apa yang disebut korupsi struktural (*structural corruption*). Memang hal inilah yang menjadi perhatian masa sebelum reformasi karena menurut Alkostar, korupsi struktural ini terjadi biasanya di Parlemen atau badan pemerintah lainnya yang pada dasarnya melekat pada sistem pelaksanaan kekuasaan politik.<sup>17</sup> Sedangkan Widjaja dalam tulisannya meregangkan dimensi korupsi dalam ranah yang lebih luas:

Jika kita merasa jengkel dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, maka kita cuma perlu melihat apa yang terjadi di jalan-jalan di kota untuk mendapatkan bukti bahwa rakyat kecil dan miskin pun mempertontonkan perilaku serupa. Para pengendara sepeda motor yang seenaknya menerobos lampu merah, bahkan menyerempet kendaraan-kendaraan lain tanpa sedikit pun merasa bersalah, atau orang-orang kecil yang tidak bersedia antri, dsb., ... Para mahasiswa yang menyontek, terlibat dalam tawuran yang anarkhis, atau menggunakan uang kiriman orang tuanya untuk membeli narkoba, dsb., juga membuktikan hal yang sama.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., 14-15. Bdk. Paulus Sugeng Widjaja, "Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal" di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya*, 23.

<sup>16</sup> Paulus Sugeng Widjaja, "Korupsi", 24.

<sup>17</sup> Artidjo Alkostar, "Mengkritisi", 4.

<sup>18</sup> Paulus Sugeng Widjaja, "Korupsi", 19.

Walaupun Tomagola membuat empat kategori korupsi<sup>19</sup> (korupsi dalam birokrasi, korupsi politik, korupsi kebijakan dan korupsi dana publik), argumentasi Widjaja dalam hal ini dapat menjangkau seluruhnya. Saya setuju dengan argumentasi ini. Oleh karena itu, saya tidak akan melakukan penelitian terhadap korupsi *an sich* sehingga harus memperlihatkan kategori korupsi seperti apa yang akan dibahas secara lebih spesifik dan mendalam, melainkan masuk ke dalam ranah salah satu nilai yang memengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan sebuah aksi yang dapat berujung pada tindakan korupsi itu sendiri sebagai sebuah fenomena.

Meskipun tidak akan melakukan penelitian terhadap korupsi *an sich*, namun Widjaja mengingatkan bahwa definisi kata ‘korupsi’ itu sendiri perlu dijelaskan ketika kita hendak melakukan analisis moral terhadapnya.<sup>20</sup> Penjelasan mengenai definisi ini menjadi penting karena definisi ini menentukan apakah sebuah tindakan yang dilakukan adalah sebuah korupsi. Ia memperlihatkan apa yang disebut sebagai analisis ‘*moral notion*’. Analisis ini menurut Widjaja berangkat dari analisis terhadap elemen-elemen formal dari moralitas.<sup>21</sup> Widjaja menambahkan:

Artinya, kita perlu mendefinisikan dengan jelas elemen-elemen formal apa yang membuat sebuah tindakan bisa disebut sebagai korupsi, sehingga para pelaku korupsi tidak berkelit dengan mengklaim bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sebuah korupsi tapi sesuatu yang lain.<sup>22</sup>

Berdasarkan hal ini, Widjaja memperlihatkan perbedaan antara ‘gerak’ (*move*) dan ‘tindakan’ (*act*). Menurutnya, korupsi adalah sebuah ‘tindakan’ (*act*); sesuatu yang kita lakukan berdasarkan pemikiran mendalam hingga kita tahu dengan sadar, alasan-alasan yang melandasi tindakan yang kita lakukan. Ia bukan sekedar ‘gerak’ (*move*) sehingga dimunculkan dari sekedar ketidaksengajaan belaka. Bahkan Widjaja menegaskan bahwa korupsi tidak hanya sebuah ‘tindakan’ individual tetapi juga sebuah konspirasi kelompok(!).<sup>23</sup>

Mengenai ‘tindakan’ (*act*) ini pun, Widjaja membedakannya menjadi dua yaitu ‘tindakan dengan maksud tertentu’ (*intentional action*) dan ‘tindakan dengan tujuan tertentu’ (*purposive action*).<sup>24</sup> Menurutnya, *intentional action* adalah sebuah tindakan yang hanya bisa dijelaskan oleh pelaku sebagai agen, sedangkan *purposive action* bisa dijelaskan oleh pengamat.<sup>25</sup> Dengan melihat perbedaan ini, Widjaja mengategorikan ‘tindakan’ korupsi sebagai *intentional action* karena menurutnya, korupsi dilakukan oleh seorang manusia dan manusia itu bukanlah sekedar

---

<sup>19</sup> Tamrin Amal Tomagola, “Korupsi”, 101-103.

<sup>20</sup> Paulus Sugeng Widjaja, “Korupsi”, 25-26.

<sup>21</sup> Ibid., 25.

<sup>22</sup> Ibid., 25-26.

<sup>23</sup> Ibid., 24.

<sup>24</sup> Ibid., 27.

<sup>25</sup> Ibid.

apa yang terjadi pada dirinya melainkan apa yang sengaja ia bentuk.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, korupsi sebagai *intentional action* harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Berdasarkan analisis di atas, saya mendefinisikan ‘korupsi’ sebagai sebuah ‘tindakan dengan maksud tertentu’ (*intentional action*) yang dilakukan oleh manusia, baik secara individual maupun kolektif, demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi diri atau kelompoknya sendiri, sambil mengkhianati dan menindas orang lain serta merugikan kesejahteraan orang lain beserta aspek-aspek kehidupan manusia lainnya sehingga menyebabkan perubahan dari kondisi yang adil, benar, jujur, bertanggungjawab, sejahtera, damai dan sebagainya, ke dalam kondisi yang sebaliknya.<sup>27</sup>

Walaupun demikian, saya menyadari bahwa elemen-elemen formal dari nosi moral tindakan korupsi perlu didefinisikan kembali akibat perkembangan budaya sehingga tidak seperti perkataan Magnis-Suseno yang dikutip oleh Widjaja bahwa “garis jelas antara kemanusiaan yang wajar dan sikap bajingan menjadi kabur.”<sup>28</sup> Oleh sebab itu, definisi yang saya utarakan di atas tentang kata ‘korupsi’ adalah sebuah upaya memaparkan salah satu sumbangan saya dalam mengisi elemen-elemen formal dari nosi moral tindakan korupsi yang terbuka untuk diperbarui bahkan diubah seiring dengan perubahan konteks. Hal ini diungkapkan karena kita semua mengorganisir nosi-nosi moral sesuai dengan realita dunia yang kita lihat.<sup>29</sup>

## **B. Tanggung Jawab Sebagai Sebuah Kebajikan**

Saya bukanlah seorang politisi dan sangat awam dalam diskursus sosio-politik di Indonesia sekalipun. Oleh karena itu setiap usaha menjawab persoalan sosio-politis yang dilakukan dapat dicurigai sebagai usaha mengkhotbahi para politisi dan hal ini yang harus saya hindari. Namun demikian, bukan berarti saya tidak boleh berbicara dalam ranah ini. Sebagai warga negara dan seorang teolog Indonesia, tentu saya dituntut untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara secara teologis karena setiap warga negara memiliki andil terhadap tata reksa negaranya.<sup>30</sup> Dalam rangka inilah saya melakukan penelitian terkait dengan ranah saya di bidang teologi.

Dalam tulisannya, Magnis-Suseno mengatakan bahwa perbuatan korup adalah sesuatu yang memalukan dan oleh karena itu perlu dilakukan kampanye melalui pendidikan yang

---

<sup>26</sup> Ibid., 26-27.

<sup>27</sup> Ibid., 26-27, 31; Tamrin Amal Tomagola, “Korupsi”, 100; Yusak Tridarmanto, “Menjalankan Fungsi Kepemimpinan Negara Berwawasan Falsafah *Hasta Brata*”, di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya*, 194.

<sup>28</sup> Paulus Sugeng Widjaja, “Korupsi”, 30.

<sup>29</sup> Ibid., 31.

<sup>30</sup> Daniel K. Listijabudi, “Malunya Jadi Orang Indonesia: Sebuah Refleksi Sederhana atas Realitas Bangsa Sendiri” di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya*, 190.



menegaskan *kejujuran, rasa keadilan, rasa tanggung jawab dan keberanian untuk berprinsip*.<sup>31</sup> Hal ini menegaskan bahwa perhatian terhadap kebajikan-kebajikan di dunia pendidikan sebagai lawan dari perbuatan korup menjadi penting. Hal ini menjadi menarik karena tanggung jawab sebagai sebuah kebajikan menjadi salah satu kebajikan yang harus mendapat penegasan.

Memang persoalan korupsi berarti juga persoalan tentang tanggung jawab. Agar tidak terlalu luas, saya mengambil contoh korupsi struktural yang dipaparkan oleh Magnis-Suseno: seorang anggota legislatif adalah orang-orang yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat demi menyalurkan aspirasi rakyat untuk kebaikan bersama. Dengan demikian berarti seorang legislatif yang dipilih tersebut secara sadar memikul tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan cara menyalurkan aspirasi rakyat tersebut sehingga setiap hal yang dilakukan oleh seorang legislatif harus memiliki visi demi kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Jika visi ini tidak terpenuhi dan seorang legislatif malah mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat yang ia wakili (dan itulah sebabnya ia disebut sebagai wakil rakyat), maka seorang legislatif dapat dikatakan tidak bertanggungjawab(!).

Saya teringat dengan sebuah iklan di televisi tahun 2012 yang dapat dijadikan bahan refleksi. Iklan tersebut menampilkan seseorang yang berperan sebagai *jin* (baca: makhluk halus) yang keluar dari lampu ajaibnya di tengah-tengah rapat dengan meja rapat yang terpajang tulisan ‘wakil rakyat miskin’ dan mengatakan, “berikan satu permintaan, maka akan dikabulkan”. Lalu para wakil rakyat tersebut meminta kepada *jin* untuk menaikkan pangkat mereka. Setelah itu *jin* itu berkata, “permintaan dikabulkan”. Saat itu juga seluruh wakil rakyat yang berjas dan berdasi segera berubah menjadi rakyat jelata dengan pakaian yang compang-camping. Mereka bingung dan bertanya kepada *jin* dengan sedih, “mengapa kami *kok* malah menjadi rakyat miskin?” Lalu *jin* menjelaskan dengan mengangkat papan di meja yang bertuliskan ‘wakil rakyat miskin’. Menurut *jin*, jika wakil rakyat ingin naik pangkat, maka *jin* tinggal menghapus kata ‘wakil’ dari ‘wakil rakyat miskin’ sehingga naik pangkat menjadi ‘rakyat miskin’.<sup>32</sup>

Selain itu ada pula sebuah iklan dengan produk yang sama menayangkan adegan yang berbeda. *Jin* yang ada di dalam adegan tersebut sedang beradu kemampuan dengan dua *jin* lainnya. Kedua *jin* yang lain menghilangkan Piramida dan Gunung Fuji sedangkan *jin* dari Indonesia dengan *entengnya* menghilangkan kertas bertumpuk setinggi badannya sambil berkata, “kasus-kasus korupsi, hilang!” Lalu serentak seluruh penonton bertepuktangan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Franz Magnis-Suseno, “Lumpur”, 15.

<sup>32</sup> Lih. “Iklan Djarum 76 Versi Wakil Dibuang Rakyat Kecil” dalam video yang dilihat dari website <http://www.youtube.com/watch?v=QMpxGC-Knfc> diakses 15 Februari 2014.

<sup>33</sup> Lih. “Djarum 76 Kontes Jin 45 Detik” dalam video yang dilihat dari website <http://www.youtube.com/watch?v=FYO856zIkFI> diakses 15 Februari 2014.

Cerita-cerita ini menegaskan bahwa permasalahan tanggung jawab di Indonesia semakin mendesak. Terlalu mendesak sehingga membuat iklan di Indonesia (iklan rokok) menampilkan adegan-adegan seperti di atas. Dari iklan di atas dapat dipindai sebuah ideologi di balik adegan tersebut bahwa rakyat semakin mempertanyakan tanggung jawab wakil-wakil rakyatnya apalagi terkait kasus-kasus korupsi yang belum selesai namun seakan-akan hilang tanpa jejak. Bukankah hal ini yang seharusnya ada di dalam paradigma para wakil rakyat tersebut? Bahwa mereka dipilih sebagai ‘wakil rakyat’ karena mereka mewakili rakyat yang posisinya (seharusnya) lebih tinggi dari mereka. Dengan demikian, wakil rakyat seharusnya bertanggungjawab kepada rakyat yang telah mengutusinya ‘mewakili’ rakyat. Namun sayangnya realita berkata lain. Rakyat semakin menderita karena perbuatan wakil-wakil rakyatnya. Wakil rakyat tidak lagi bertanggungjawab terhadap rakyat yang mengutusinya bahkan mengkhianati mereka dengan melakukan tindakan korupsi(!).

Persoalan ini tidak hanya menyentuh ranah sosio-politik melainkan ranah spiritual-teologis. Fakta yang dipaparkan Widjaja sebagai tanggapan terhadap Magnis-Suseno di awal tulisannya mengenai korupsi menjadi pertanyaan bagi orang-orang beragama. Magnis-Suseno yang menunjukkan bahwa negara-negara yang mayoritas masyarakatnya mengklaim diri sebagai tidak bertuhan justru lebih sejahtera dan lebih bersih dari korupsi menggelitik orang-orang yang mengaku diri beriman.<sup>34</sup> Walaupun Widjaja menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara keberagamaan seseorang dengan kehidupan yang bersih dari korupsi<sup>35</sup>, namun menurut saya bukan berarti agama tidak dapat berpengaruh apa-apa sama sekali terhadap tindak tanduk kegiatan korupsi(!).

Sebagai teolog Kristen, maka saya akan meneliti dari sudut pandang Kekristenan. Kekristenan yang hidup di Indonesia berarti Kekristenan yang secara langsung bersinggungan dengan fenomena korupsi serta persoalan tanggung jawab di dalamnya. Pengikut-pengikut Kristus (baca: orang Kristen) yang mengaku diri sebagai orang beriman yang hidup di negara Indonesia dengan konteks korupsinya tentu adalah orang-orang beriman yang memiliki tanggung jawab juga terhadap negaranya. Dengan demikian, menurut saya tentu dibutuhkan pengetahuan yang jelas tentang makna tanggung jawab dalam ranah teologi Kristen sebagai salah satu kebijakan yang perlu dipupuk. Oleh karena itu, saya mengusulkan dua pertanyaan teologis yang akan membimbing saya dalam melakukan penelitian ini. Pertanyaan penelitian tersebut, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Franz Magnis-Suseno, “Lumpur,” 2-4.

<sup>35</sup> Paulus Sugeng Widjaja, “Korupsi,” 18.

1. Apa makna tanggung jawab dari sudut pandang etika Kristen?
2. Bagaimana orang-orang Kristen dapat memupuk tanggung jawab sebagai kebajikan untuk melawan korupsi?

Dua pertanyaan inilah yang akan dicoba dijawab dalam penelitian ini. Jika dirumuskan dalam satu kalimat, maka pertanyaan tersebut menjadi demikian:

*Apa makna tanggung jawab dari sudut pandang etika Kristen dan bagaimana orang-orang Kristen dapat memupuknya sebagai kebajikan untuk melawan korupsi?*

### **C. Batasan Masalah**

1. Batasan masalah pada poin pertama secara khusus akan diarahkan pada dua pemahaman teolog besar yaitu Dietrich Bonhoeffer dan Helmut Richard Niebuhr mengenai tanggung jawab secara etis-teologis.
2. Batasan masalah pada poin kedua adalah melihat satu pemahaman teolog Indonesia yaitu Paulus Sugeng Widjaja di dalam disertasinya dalam rangka pembentukan karakter yang bertanggungjawab. Pemahaman beliau saya angkat berkaitan dengan teori *character formation* sebagai tanggapan terhadap fenomena korupsi di Indonesia.

### **D. Tujuan**

Tujuan ditulisnya skripsi ini adalah:

1. Menemukan pemahaman tentang makna tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani, secara khusus dengan menimba inspirasi dari pemikiran Dietrich Bonhoeffer dan Helmut Richard Niebuhr.
2. Menanggapi fenomena korupsi dengan mencari cara memupuk tanggung jawab melalui pembentukan karakter yang bertanggungjawab sebagai sebuah upaya transformasi internal untuk melawan korupsi.

### **E. Judul**

Dari latar belakang permasalahan, permasalahan dan batasannya serta tujuan penulisan di atas, maka judul skripsi yang diusulkan adalah:

*Memupuk Tanggung Jawab, Melawan Korupsi: Sebuah Telaah Etis-Teologis Tentang Makna dan Pembentukan Tanggung Jawab Sebagai Kebajikan Kristiani Untuk Melawan Korupsi*

Penjelasan Judul:

<i>Memupuk Tanggung Jawab</i>	: tulisan ini bertujuan menelaah tentang bagaimana manusia dapat memupuk tanggung jawab melalui upaya pembentukan karakter yang bertanggungjawab
<i>Melawan Korupsi</i>	: upaya tersebut di atas dilakukan supaya manusia tidak melakukan korupsi
<i>Sebuah Telaah Etis-Teologis</i>	: tulisan ini dibuat melalui telaah etis-teologis
<i>Tentang Makna dan Pembentukan Tanggung-Jawab Sebagai Kebajikan Kristiani untuk Melawan</i>	: pembahasan dilakukan dengan meneliti makna dan upaya pembentukan tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani agar tidak melakukan korupsi. Kebajikan tersebut terkait dengan proses transformasi internal sebagai upaya memupuk tanggung jawab demi melawan korupsi.
<i>Korupsi</i>	: definisi dari istilah ‘korupsi’ yang digunakan di dalam tulisan ini adalah sebuah ‘tindakan yang disengaja’ ( <i>intentional action</i> ) dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh manusia, baik secara individual maupun kolektif, demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi diri atau kelompoknya sendiri, sambil mengkhianati dan menindas serta merugikan kesejahteraan orang lain beserta aspek-aspek kehidupan manusia lainnya sehingga menyebabkan perubahan dari kondisi yang adil, benar, jujur, bertanggungjawab, sejahtera, damai dan sebagainya, ke dalam kondisi yang sebaliknya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan studi pustaka. Pembahasan deskriptif dilakukan dengan mengolah beberapa sumber-sumber pandangan ahli mengenai topik terkait.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan untuk mendeskripsikan pembahasan masalah-masalah yang telah dikemukakan:

## **BAB I: Pendahuluan**

Bagian ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan dan pembatasan atas masalah, tujuan, judul, metode penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II: Tiga Pilar Sosiologis Dan Korupsi Sebagai Persoalan Moralitas Dan Etika**

Pada bagian ini akan dipaparkan solusi-solusi yang ada terkait dengan persoalan korupsi dari tiga subsistem sosiologis yang membentuk kehidupan sosial. Melalui bab ini, saya memusatkan perhatian pada pilar budaya yang melihat bahwa korupsi merupakan masalah moralitas dan etika karena terkait dengan kebiasaan dan penilaian berdasarkan norma-norma tertentu.

## **BAB III: Makna Tanggung Jawab Sebagai Sebuah Kebajikan**

Pada bagian ini akan dijelaskan pemikiran Dietrich Bonhoeffer dan Helmut Richard Niebuhr tentang makna tanggung jawab Kristiani secara etis-teologis.

## **BAB IV: Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Melawan Korupsi di Indonesia**

Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Kristen dapat membentuk karakter yang bertanggungjawab agar tidak melakukan korupsi. Saya akan menggunakan teori *character formation* dari Paulus Sugeng Widjaja. Pada bagian ini saya juga akan mencoba melihat aplikasi teori yang ada bagi konteks korupsi di Indonesia untuk melawan korupsi.

## **BAB V: Kesimpulan dan Saran Penelitian Lebih Lanjut**

Bagian ini berisi tentang kesimpulan seluruh bab di dalam skripsi ini. Selain itu, pada bagian ini juga saya akan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan di dalam Bab I Pendahuluan. Dari pemaparan akan batasan penelitian ini, saya di dalam bab ini juga akan memberikan saran demi upaya penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN LEBIH LANJUT

#### A. Kesimpulan Akhir dan Kontribusi Penelitian

Di dalam Bab I saya telah memperlihatkan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang disengaja dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh manusia, baik secara individual maupun kolektif, demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bagi diri atau kelompoknya sendiri, sambil mengkhianati dan menindas orang lain serta merugikan kesejahteraan orang lain beserta aspek-aspek kehidupan manusia lainnya sehingga menyebabkan perubahan dari kondisi yang adil, benar, jujur, bertanggungjawab, sejahtera, damai dan sebagainya, ke dalam kondisi yang sebaliknya. Sifat korupsi yang sistemik membuat korupsi menjadi ‘penyakit kanker’ yang menggerogoti negara Indonesia di segala aspek yang ada. Upaya-upaya pendekatan dalam rangka mengatasi *extraordinary crime* atau *crime against humanity* ini seringkali dilakukan hanya dengan melihat faktor-faktor eksternal sehingga menghambat masyarakat bertumbuh menjadi agen-agen aktual-rasional yang mampu melakukan aksi refleksi dari kesadaran pribadi melalui stimulus internal.

Di dalam Bab II saya telah memaparkan pendekatan-pendekatan solusi yang ada terkait dengan persoalan korupsi dari tiga subsistem sosiologis yang disebut juga ‘tiga pilar sosiologis’ yang membentuk kehidupan sosial yaitu: pilar politik, pilar ekonomi dan pilar budaya. Pendekatan solusi pilar politik yang memiliki dasar hubungan peraturan/hukum menurut saya tidak efektif untuk menanggapi persoalan korupsi di Indonesia karena ancaman hukuman berat pada kenyataannya sampai saat ini tidak berhasil memberantas korupsi. Selain itu, ancaman hukuman berat ini seringkali memunculkan perdebatan-perdebatan baru tentang kriteria-kriteria yang pantas untuk menentukan hukuman berat apa yang paling cocok bagi para pelaku korupsi. Diskusi tentang hukuman berat pun menurut saya tidak jarang menimbulkan persoalan-persoalan etis baru, misalnya saja hukuman mati. Pendekatan solusi dengan menawarkan ancaman hukuman berat bagi para pelaku korupsi juga menurut saya telah berhasil menyihir masyarakat menjadi manusia-manusia yang bertumbuh dengan pola pikir yang jahat. Hal ini dapat terjadi karena mereka merasa bahwa sampai saat ini belum ada hukuman berat yang menimbulkan efek jera sehingga mereka akan selalu memikirkan dan memutuskan hukuman apa saja yang seberat-

beratnya, bahkan sekeji-kejinya bagi para koruptor supaya ada efek jera. Di sisi lain, kegagalan ancaman hukuman berat yang menimbulkan efek jera akan selalu menjadi air yang segar bagi bibit karakter masyarakat yang destruktif ini. Kegagalan ancaman hukuman berat dengan kata lain menjadi ladang yang baik bagi pertumbuhan karakter masyarakat yang kejam dan menakutkan. Dengan demikian saya menyimpulkan bahwa selain tidak efektif, pendekatan pilar politik terkait dengan hukuman/peraturan terhadap persoalan korupsi juga dapat menjadi pendekatan yang destruktif.

Pendekatan solusi pilar ekonomi yang memiliki dasar hubungan transaksi-transaksi menurut saya juga tidak efektif untuk menanggapi persoalan korupsi di Indonesia karena tidak akan mampu membendung niat jahat manusia yang lahir pada dirinya sendiri, misalnya saja budaya hedonisme dan konsumerisme. Selain itu, perhatian yang diberikan sebenarnya hanyalah kepada para elite. Salah satu pendekatan solusi yang ditawarkan pilar ini adalah kenaikan remunerasi kepada pegawai negeri sipil yang berada di dalam kepolisian, peradilan, partai politik dan parlemen. Salah satu contoh yang dapat kita lihat bersama adalah tawaran solusi yang dipaparkan oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ketika melakukan debat calon Presiden dan calon Wakil Presiden melawan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada hari Selasa, 10 Juni 2014 yang disiarkan *live* di beberapa stasiun televisi nasional di Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa kelayakan hidup para elite harus terjamin terlebih dahulu jika tidak mau terjadi korupsi. Menurut Prabowo, "Ini strategi kami, kami ingin tutup kebocoran. Karena meningkatkan kualitas penegak hukum pun ujung-ujungnya butuh duit. Kalau kita mau perbaiki korupsi harus perbaiki hidup pejabat negara. Semua pejabat dan pegawai negeri di tempat penting harus dijamin kualitas hidupnya."<sup>1</sup> Di pihak lain ia menyebutkan bahwa gaji seorang menteri pada saat ia berbicara adalah sekitar delapan belas juta Rupiah(!). Jika menteri dengan gaji sebesar demikian dapat ditolerir melakukan korupsi karena dirasa kebutuhan hidupnya belum layak, lalu apakah seorang dosen dengan gaji sebesar tiga juta Rupiah boleh melakukan korupsi? Contoh ini pula mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa selain tidak efektif karena pendekatan ini tidak mampu membendung niat jahat manusia, di sisi lain kita tidak dapat menentukan kriteria-kriteria kelayakan seseorang mendapatkan remunerasi. Dengan demikian jelas bahwa persoalannya tidak berhenti sebatas pada berapa besar

---

<sup>1</sup> Lih. "Korupsi Marak, Prabowo Salahkan Kecilnya Gaji Pejabat" dalam <http://www.jpnn.com/read/2014/06/09/239358/Korupsi-Marak,-Prabowo-Salahkan-Kecilnya-Gaji-Pejabat-> diakses pada tanggal 11 Juni 2014; Bdk. "Debat Capres Prabowo Korupsi Karena Gaji Kecil" <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/09/269583690/Debat-Capres-Prabowo-Korupsi-Karena-Gaji-Kecil> diakses pada tanggal 11 Juni 2014.

*reward* yang diberikan sehingga mencegah seseorang melakukan korupsi, melainkan persoalan karakter manusia yang memengaruhi kondisi moral seorang manusia.

Dengan melihat kedua kegagalan pendekatan pilar politik dan ekonomi, saya mengusung sebuah pilar yang seringkali dilupakan yaitu pilar budaya, bukan sebagai *counter* bagi kedua pilar lainnya melainkan sebagai kekuatan yang setara dalam upaya mengingatkan kedua pilar tersebut. Melalui pilar budaya dengan dasar hubungan nilai-nilai ini saya memperlihatkan bahwa penelaahan etis-teologis menjadi bernas untuk melawan korupsi masa kini karena Gereja memiliki kekuatan sosiologis yang kuat sebagai salah satu *civil society* yang berdiri di pilar budaya bergandengan dengan dua pilar lainnya: politik dan ekonomi. Di dalam Bab I saya mengingatkan bahwa korupsi adalah tindakan yang disengaja (*intentional action*), oleh karena itu kita juga melihat bahwa transformasi faktor-faktor eksternal seperti ancaman hukuman (*punishment*) dan sistem imbalan (*reward*) yang ditunjukkan oleh kedua pilar terakhir ini tidak efektif. Ketidakefektifan kedua pilar ini terjadi karena pilar budaya sering terlupakan. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Indonesia berada di tengah kondisi sosial yang tidak sehat karena ketimpangan ketiga pilar sosiologis tersebut.

Pengusungan kembali pilar yang ketiga (pilar budaya) memperlihatkan dengan jelas bahwa korupsi merupakan persoalan etika dan moralitas karena telah melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip yang ada. Praktik korupsi telah menjadi bagian dari moralitas banyak orang di Indonesia sehingga dianggap wajar. Moralitas ini bermasalah. Memindai praktik korupsi sebagai persoalan moralitas berarti mempersoalkan nilai etis dari praktik tersebut agar terbentuk moralitas yang baru. Demi terbentuknya moralitas yang baru, yang lebih baik, tentu penemuan pendekatan solusi bagi praktik korupsi harus diletakkan pada bingkai etis-teologis yang tepat. Oleh sebab itu, saya memberikan titik tolak pendekatan etis-teologis etika Kristen sebagai bingkai pendekatan ini.

Melihat sifat korupsi yang sistemik, kita memerlukan suatu gerakan sosial (*social movement*) untuk memberantasnya. Gereja sebagai *civil society* seharusnya mampu menjadi gerakan sosial yang memberdayakan (*social empowerment*) tidak hanya jemaatnya sendiri melainkan seluruh rakyat Indonesia. Pemberdayaan yang diusung adalah pemberdayaan (baca: pembentukan) karakter masyarakat untuk menjadi orang-orang yang anti-korupsi. Dengan melihat hal ini, maka sebenarnya saya ingin memperlihatkan bahwa manusia memerlukan apa yang disebut dengan transformasi internal; transformasi yang mengubah dari dalam individu dan hal ini dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *character formation*.

Karena pembicaraan tentang etika dan moralitas dalam kaitannya dengan *character formation* berbicara tentang nilai-nilai (*values*), maka mau-tidak-mau saya harus menentukan



salah satu nilai yang akan saya pupuk dalam rangka melawan korupsi sebagai batasan pada penulisan ini. Pada Bab I saya telah memutuskan untuk memilih nilai tanggung jawab sebagai kebijakan yang perlu dipupuk. Oleh sebab itu, di dalam Bab III saya menggali dan memperlihatkan makna tanggung jawab sebagai kebijakan Kristiani dengan menimba inspirasi dari kedua teolog yaitu Dietrich Bonhoeffer dan Helmut Richard Niebuhr.

Korupsi adalah kebaikan yang terselewengkan (*peverted good*) karena kepercayaan mengolah sumber dana bagi kesejahteraan orang banyak dipangkas bahkan dilibas habis demi kepentingan diri sendiri. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Berbeda dengan Kristus, Ia adalah orang yang *par excellence* bertanggungjawab. Tanggung jawab yang Ia tujukan kepada Allah merupakan panggilan konkrit-Nya untuk bertanggungjawab kepada manusia. Tanggung jawab Kristus didasarkan pada kasih Allah dan kasih kepada sesama, untuk memberikan hidup bagi orang lain, khususnya yang menderita, tanpa syarat, tanpa batas. Oleh sebab itu, kepercayaan kita kepada Kristus harus ditanggapi dengan ketaatan total. Namun ketaatan total tersebut harus lahir dari kebebasannya. Manusia yang percaya kepada Kristus adalah manusia yang memproyeksikan ketaatan totalnya kepada Kristus melalui kebebasannya dengan memutuskan untuk mau menundukkan dirinya pada bimbingan Allah. Manusia yang bertanggungjawab dengan demikian akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan korupsi karena korupsi bertentangan dengan karakter Kristus yang bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab dituntut untuk menunjang solidaritasnya terhadap mereka yang tertindas dan mengasihi orang lain tanpa membedakan, tanpa syarat, tanpa batas. Solidaritas ini merupakan respon kita terhadap karya Allah di tengah dunia.

Dari penelaahan tentang makna tanggung jawab dengan menimba inspirasi dari kedua teolog tersebut, saya memberikan kontribusi penelitian dengan menyimpulkan bahwa makna tanggung jawab sebagai kebijakan Kristiani dalam konteks korupsi di Indonesia adalah ***kemampuan untuk dengan bebas mau mengasihi dan memiliki solidaritas dengan orang-orang yang menderita tanpa membedakan latar belakang mereka, tanpa syarat, tanpa batas, sebagai wujud dari respon manusia terhadap karya Allah di dunia.*** Kesimpulan tentang makna tanggung jawab sebagai kebijakan Kristiani ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian pada poin pertama di dalam Bab I yaitu: *apa makna tanggung jawab dari sudut pandang etika Kristen?* Penemuan tentang makna tanggung jawab sebagai kebijakan Kristiani dengan menimba inspirasi dari kedua teolog tersebut juga telah mencapai tujuan penulisan skripsi pada poin pertama di dalam Bab I yaitu: *menemukan pemahaman tentang makna tanggung jawab sebagai kebijakan Kristiani, secara khusus dengan menimba inspirasi dari pemikiran Dietrich Bonhoeffer dan Helmut Richard Niebuhr.*

Di dalam Bab I saya memperlihatkan bahwa tidak adanya korelasi positif antara keberagamaan seseorang dengan tindakan nir-koruptif, tidak serta merta berarti bahwa agama tidak berpengaruh apa-apa sama sekali terhadap tindak tanduk kegiatan korupsi. Namun pengaruh pun dapat berarti dua hal, pengaruh yang baik atau buruk. Ketika agama (baca: Gereja) mampu menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan di dalam pondasi sosiologis masyarakat dan mampu menggunakan kekuatannya untuk melakukan pemberdayaan sosial (*social empowerment*), maka agama berpengaruh terhadap tindak tanduk kegiatan korupsi karena ternyata agama memberdayakan umat untuk melawan korupsi. Ini pengaruh yang baik. Namun dapat terjadi (kegagalan) agama yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi di Indonesia. Ini pengaruh yang buruk. Ada empat hal yang menurut saya dapat menjadi elemen pengaruh buruk gereja dalam tindak tanduk korupsi.

Pertama, dikotomi Gereja yang memisahkan realitas ‘rohani’ dengan ‘duniawi’. Dikotomi ini membutuhkan manusia pada realitas yang terjadi sehingga ia tidak mampu melakukan interpretasi atasnya, apalagi memberikan respon. Hal ini juga muncul karena Gereja tidak menyadari kekuatan sosiologis yang dimilikinya. Kurangnya kesadaran ini menimbulkan efek tidak peduli dengan urusan korupsi yang dianggap begitu duniawi. Gereja merasa tidak berdaya karena ia hanya mampu mengurus persoalan rohani. Ketidakberdayaan ini pun ditanggapi dengan cara yang keliru. Gereja merasa dirinya harus terlibat secara politik sebagai saksi-saksi Kristus di dunia politik. Kenyataannya, sifat korupsi yang sistemik tidak memandang bulu dan menghancurkan mereka.

Kedua, dikotomi Gereja yang memisahkan spiritualitas dan moralitas. Gereja lebih mementingkan keutuhan ritual daripada keutuhan moral jemaat. Ia memilih untuk beribadah kepada Kristus melalui ritual daripada memproyeksikan Kristus secara moral di tengah dunia yang aktual.

Ketiga, pemahaman Gereja tentang dosa dan pengampunan tidak lagi konkret. Gereja seringkali menjadi obat bagi para koruptor dengan memanfaatkan pengampunan murahan (*cheap grace*) dari dosa korupsinya. Gereja tidak mampu melihat bahwa dosa terbesar bangsa Indonesia secara konkret saat ini adalah korupsi.

Keempat, Gereja tidak mampu melihat persoalan korupsi yang multidimensional sehingga teologi yang dikembangkan dalam rangka melihat persoalan korupsi begitu parsial. Bentuk relasi-relasi yang ada tidak lagi mampu melihat realitas Kristus sebagai realitas ketiga di mana interaksi di dalam relasi yang ada pada akhirnya merupakan respon dan tanggung jawab manusia terhadap Allah yang berdaulat karena Ia ada di balik segala sesuatu.

Melihat kegagalan Gereja tersebut, saya menduga bahwa seharusnya nilai-nilai kebajikan Kristiani yang dianut orang Kristen mampu melepaskan seseorang dari jerat korupsi. Kenyataan di mana masih adanya tindakan korupsi di Indonesia memperlihatkan kemungkinan adanya ‘ruang kosong’ antara nilai-nilai kebajikan Kristiani dengan tindakan nir-koruptif yaitu kegagalan Gereja untuk membentuk karakter orang-orang Kristen sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Kristiani. Tanpa upaya pembentukan karakter, memang tidak akan mungkin ada korelasi positif antara keberagamaan seseorang dan tindakan nir-koruptif.

Melalui penemuan tentang makna tanggung jawab sebagai kebajikan Kristiani yang ditimba dari pemahaman Bonhoeffer dan Niebuhr di dalam Bab III, maka di dalam Bab IV saya menjawab pertanyaan poin kedua di dalam Bab I dengan memperlihatkan *bagaimana orang-orang Kristen (baca: Gereja) dapat memupuk tanggung jawab sebagai kebajikan untuk melawan korupsi*. Melalui analisis di dalam Bab IV saya memberikan kontribusi penelitian dengan menyimpulkan bahwa ***orang-orang Kristen dapat memupuk tanggung jawab sebagai kebajikan untuk melawan korupsi melalui upaya pembentukan karakter yang bertanggungjawab***. Adapun empat elemen teori *character formation* Widjaja (kebajikan-kebajikan, *telos*, narasi dan praktik sosial) saya gunakan bagi pembentukan karakter yang bertanggungjawab, sebagai berikut:

***Pertama, pembentukan karakter yang bertanggungjawab dilakukan dengan cara mempelajari, memupuk dan melatih kebajikan tanggung jawab***. Kebajikan tanggung jawab perlu diperoleh, dikembangkan dan dilatih. Kebajikan tanggung jawab membantu kita untuk melihat adanya tindakan-tindakan korupsi yang menyengsarakan dan menindas rakyat yang sama sekali tidak mengasihi apalagi solider terhadap sesamanya. Kebajikan tanggung jawab akan memampukan kita untuk peka terhadap sesama yang tertindas. Kebajikan tanggung jawab akan membekali kita dengan kemampuan yang diperlukan untuk mengasihi dan solider kepada siapa saja, tanpa syarat, tanpa batas. Dengan mempelajari, memupuk dan melatih kebajikan tanggung jawab kita mampu memperoleh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kebajikan tanggung jawab. Proses ini merupakan *deliberate activities* (aktivitas yang disengaja) sebagai *self-agency* karena kebajikan tanggung jawab dibentuk oleh keputusan dengan bebas mengambil tindakan mengasihi dan solider terhadap sesama yang menderita, tanpa syarat, tanpa batas, yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang. Dengan kebajikan tanggung jawab, seseorang tidak hanya menentang melainkan juga melawan setiap bentuk tindakan korupsi yang dilakukan sesamanya. Pembentukan karakter bertanggungjawab dapat dilakukan dengan mempraktikkan kebajikan tanggung jawab di dalam realitas korupsi di Indonesia sebagai upaya *learning by doing*. Seorang koruptor yang berusaha sungguh-sungguh memupuk kebajikan tanggung jawab

akan dimampukan oleh kebajikan tersebut untuk memutus pertumbuhan karakternya yang koruptif. Pada saatnya karakter kita sebagai seseorang yang bertanggungjawab akan mengarahkan kita untuk bertindak mengasihi dan solider kepada orang lain. Namun juga pada saat yang sama, tindakan kita mengasihi dan solider terhadap semua orang tanpa syarat akan membentuk karakter kita sebagai orang-orang yang bertanggungjawab.

***Kedua, dalam pembentukan karakter kita perlu mengorientasikan kebajikan tanggung jawab pada telos, Realitas Kristus.*** Tanpa *telos* kita tidak dapat membedakan mana kebajikan, mana kefasikan. Dengan mengacu kepada Bonhoeffer dan Niebuhr, maka yang harus menjadi *telos* kita ketika membentuk karakter bertanggungjawab adalah Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus, Realitas Kristus. Karena pembentukan karakter berkaitan dengan upaya mengubah cara kita berpikir, *telos* juga akan mengarahkan nalar kita sehingga kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nalar pada gilirannya akan mengendalikan nafsu kita. Gereja memiliki peranan penting dalam pengenalan akan *telos*. Gereja tidak lagi hanya menjadi tempat di mana kita mengalami kebersamaan melainkan juga yang terutama menjadi tempat bagi kita untuk belajar mendisiplinkan nafsu kita selaras dengan *telos*, Realitas Kristus.

***Ketiga, kita perlu meletakkan pembentukan karakter bertanggungjawab di dalam konteks narasi yang memberi makna pada karakter kita karena karakter dibentuk secara signifikan oleh narasi-narasi yang diceritakan kepada kita dan narasi yang bercerita tentang diri kita sendiri.*** Apa yang baik untuk dilakukan selalu bergantung pada interpretasi kita atas narasi yang ada. Tindakan korupsi di Indonesia dengan sifatnya yang sistemik telah menjadi narasi yang destruktif yang memengaruhi bangsa Indonesia. Satu-satunya cara untuk keluar dari narasi destruktif adalah dengan memiliki integritas yang mendorong kita terhubung pada narasi yang memandu kita pada nilai-nilai dan kebajikan-kebajikan yang membentuk diri kita. Jika kita mau keluar dari narasi korupsi yang destruktif, maka kita harus meletakkan pembentukan karakter bertanggungjawab di dalam konteks narasi Kristus yang *par excellence* bertanggungjawab. Jika narasi memengaruhi pembentukan karakter kita, maka tidak ada apa yang kita sebut sebagai 'diri kita apa adanya'. Yang ada adalah menjadi diri kita menurut narasi yang kita pilih. Membentuk karakter bertanggungjawab berarti memilih narasi-narasi yang bercerita tentang Kristus yang dengan bebas mengasihi dan solider tanpa syarat, tanpa batas kepada semua orang yang menderita, bukan memilih narasi korupsi yang destruktif.

***Keempat, pembentukan karakter bertanggungjawab harus dilatih tidak hanya melalui praktik individual melainkan juga praktik sosial.*** Tanpa praktik sosial, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bertanggungjawab. Menjadi orang yang bertanggungjawab tidak hanya dapat dilakukan dengan niat melainkan juga partisipasi kita di

dalam praktik sosial. Katekisasi atau pembinaan-pembinaan lainnya di Gereja merupakan cara yang efisien untuk membentuk karakter bertanggungjawab, namun hal tersebut belum efektif sampai seseorang melibatkan diri dalam praktik sosial, bertemu dengan persoalan-persoalan konkret yang melatihnya menjadi orang-orang Kristen yang memiliki karakter bertanggungjawab.

Selain menjawab pertanyaan poin kedua di dalam Bab I, kesimpulan tentang pembentukan karakter ini juga telah mencapai tujuan penulisan skripsi pada poin kedua di dalam Bab I yaitu: *menanggapi fenomena korupsi dengan mencari cara memupuk tanggung jawab melalui pembentukan karakter yang bertanggungjawab sebagai sebuah upaya transformasi internal untuk melawan korupsi.*

## **B. Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut**

Namun dari semua yang telah saya bahas, masih banyak aspek pembentukan karakter yang tidak diangkat di dalam skripsi ini dan oleh karenanya membutuhkan penelitian lebih lanjut. Beberapa aspek ini dapat dikategorikan menjadi paling tidak tiga dimensi—jika mengacu pada struktur penulisan skripsi ini—yaitu fenomena korupsi, kebajikan-kebajikan Kristiani dan metodologi penelitian pembentukan karakter.

Fenomena korupsi yang dilihat di dalam skripsi ini dimensinya begitu renggang. Selain itu, penelitian terhadap korupsi *an sich* sengaja tidak dilakukan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan misalnya saja dengan melihat dan memilih salah satu kategori korupsi yang ditawarkan oleh Tomagola (korupsi dalam birokrasi, korupsi politik, korupsi kebijakan dan korupsi dana publik) secara lebih mendalam. Penelitian terhadap salah satu kategori dengan lebih mendalam dapat memperjelas sifat sistemik korupsi di dalamnya dan tentu saja melahirkan suatu permasalahan baru yang berpengaruh terhadap pendekatan solusi yang hendak ditawarkan.

Di dalam dimensi kebajikan-kebajikan Kristiani, saya hanya memilih satu kebajikan (tanggung jawab) dari sekian banyak kebajikan Kristiani yang ada. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan misalnya saja dengan melihat dan memilih kebajikan-kebajikan yang ditawarkan oleh Magnis-Suseno (kejujuran, rasa keadilan dan keberanian untuk berprinsip). Dengan meneliti dan membentuk kebajikan lainnya, maka kekuatan kita untuk melawan korupsi semakin besar karena karakter kita dibentuk untuk menjadi semakin bersesuaian dengan karakter Kristus.

Terkait dengan metode penelitian, skripsi ini sebagian besar menelaah tentang pemahaman-pemahaman teologis dari teolog-teolog Kristen sedangkan penelitian terhadap teks, tradisi maupun pengalaman tidak dibahas dengan mendalam. Misalnya saja membahas tentang kebajikan Kristiani, penelitian terhadap kebajikan apa saja yang bersesuaian dengan kebajikan

Kristus dapat diteliti melalui penelitian teks Alkitab dengan melakukan *close reading* dan interpretasi terhadap teks tersebut. Selain itu, studi empiris misalnya bisa dilakukan untuk melihat fenomena<sup>2</sup>, maupun dampak korupsi secara khusus di dalam Gereja. Upaya pembentukan karakter tanggung jawab juga dapat diteliti di tengah konteks berjemaat. Melalui studi empiris, kita dapat mengetahui secara empiris data-data pengalaman yang ada terkait dengan pembentukan karakter untuk melawan korupsi.

Walaupun demikian, semua upaya ini muncul dengan sebuah keprihatinan yang sama tentang persoalan korupsi di Indonesia yang telah membudaya dan begitu sistemik. Dengan demikian, melawan korupsi dapat selalu menjadi panggilan dan pengutusan kita bersama sebagai saksi-saksi Kristus di tengah konteks korupsi di Indonesia. Kiranya semangat melawan korupsi ini dapat terus dilahirkan melalui Gereja-gereja di Indonesia sambil mengingat pesan dari Noel Preston yang mengatakan, “if we fail to challenge corruption we fail to love our neighbor.”<sup>3</sup> []

---

<sup>2</sup> Penelitian secara empiris ini juga dapat melibatkan misalnya konteks ekonomi Indonesia yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kesenjangan kaya-miskin di Indonesia. Saya juga menduga bahwa upaya Magnis-Suseno ketika memperlihatkan bahwa para elite-lah yang bertanggungjawab atas tindakan korupsi ketika membahas tentang fenomena korupsi di Indonesia, paling tidak memperlihatkan kepada kita salah satu sumber persoalan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia. Persoalan kesenjangan ini juga merupakan persoalan konkret di dalam konteks Indonesia yang berkaitan dengan persoalan korupsi di Indonesia. Untuk melihat pembahasan saya tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia, lih. August Corneles Tamawiwiy-Karundeng, “*Mind The Gap!*: Berteologi Ekonomi Kontekstual Melalui Penafsiran Injil Lukas 16:9-13 dalam Rangka Mempertimbangkan Ulang Konteks Kemiskinan Yang Parah di Indonesia” di dalam *Jurnal Teologi Indonesia Vol. 1 No. 1, Juli, 2013*, 48-66.

<sup>3</sup> Christoph Stueckelberger, *Corruption-Free Churches are Possible. Experiences, Values, Solutions*. (Geneva: Globethics.net, 2010), 84.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku dan Artikel-artikel

Adeney, Bernard T.

2000 *Etika Sosial Lintas Budaya*, Yogyakarta: Kanisius.

Airaksinen, Timo

1991 *The Philosophy of Marquis de Sade*, London: Routledge.

Alkostar, Artidjo

2008 “Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen”, dalam *Jurnal Hukum UII no 1 Vol. 15*, Januari, 2008.

Arendt, Hannah

1963 *Eichmann in Jerusalem*, New York: Macmillan Company.

Artanto, Widi

2012 “Spiritualitas Pelayanan: Perjumpaan dengan Allah dan Sesama”, di dalam Asnath N. Natar (Peny.), *Pelayan, Spiritualitas & Pelayanan: Buku Perayaan/Festschrift Pdt. Christian Soetopo, DPS*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana.

Barth, Karl

1936-1962 *Church Dogmatics III/4*, Edinburgh: T & T Clark.

Benhabib, Seyla

2000 “Arendt’s Eichmann in Jerusalem”, dalam Dana Villa (Ed.), *Cambridge Companion to Hannah Arendt*, Cambridge: Cambridge University Press.

Bertens, K.

2013 *Etika*, Yogyakarta: Kanisius.

Bethge, Eberhard

1970 *Dietrich Bonhoeffer: Man of Vision, Man of Courage*, New York and Evanston: Harper & Row Publisher.

Bonhoeffer, Dietrich

1953 *Letters and Papers From Prison*, London and Glasgow: Collins Clear-Type Press.

1955 *Ethics*, New York: The MacMillan Company.

1960 *Christ The Center*, New York: Harper & Row Publisher.

1970 *The Cost of Discipleship*, New York: The Macmillan Company.

1990, 1995 *A Testament To Freedom: The Essential Writings of Dietrich Bonhoeffer*, New York: HarperCollins Publisher.

- 1998 *Sanctorum Communio: A Theological Study on the Sociology of the Church*, Minneapolis: Fortress Press.
- de Gruchy, John
- 2003 *Saksi Bagi Kristus: Kumpulan Cuplikan Karya Dietrich Bonhoeffer*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Fletcher, Verne H.
- 2007 *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan Pada Etika Kristen Dasar*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Goodin, Robert E.
- 1985 *Protecting the Vulnerable: A Re-Analysis of Our Social Responsibilities*, London: University of Chicago Press.
- Gustafson, James
- 1957 "Christian Ethics and Social Policy", di dalam Paul Ramsey (Ed.), *Faith and Ethics: The Theology of H. Richard Niebuhr*, New York: Harper & Row Publisher.
- Hare, R. M.
- 1989 *Essays on Political Morality*, New York: Oxford University Press.
- Harman, Benny K.
- 2012 *Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi*, Yogyakarta: Lamera.
- Hikam, Muhammad AS
- 1996 *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Hommel, Anne
- 2012 "Spiritualitas Pelayanan", di dalam Asnath N. Natar (Peny.), *Pelayan, Spiritualitas & Pelayanan: Buku Perayaan/Festschrift Pdt. Christian Soetopo, DPS*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana.
- Lehmann, Paul L.
- 1963 *Ethics in A Christian Context*, London: SCM.
- Listijabudi, Daniel K.
- 2012 "Malunya Jadi Orang Indonesia: Sebuah Refleksi Sederhana atas Realitas Bangsa Sendiri", di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana.



Magnis-Suseno, Franz

- 2000 *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius.
- 2012 “Lumpur Korupsi dan Integritas Agama”, di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana.

Niebuhr, Helmut Richard

- 1956 *Christ and Culture*, New York, Evanston and London: Harper Torchbooks.
- 1956 *The Purpose of the Church and Its Ministry: Reflections on the Aims of Theological Education*, New York: Harper & Brothers.
- 1963 *The Responsible Self: An Essay in Christian Moral Philosophy*, New York, Evanston and London: Harper & Row Publishers.
- 1989 *Faith On Earth: An Inquiry Into the Structure of Human Faith*, New Haven and London: Yale University Press.
- 1993 *Radical Monotheism and Western Culture*, Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press.
- 1996 *Theology, History and Culture: Major Unpublished Writings*, New Haven and London: Yale University Press.

Niebuhr, Reinhold

- 1992 *Love and Justice: Selections from the Shorter Writings of Reinhold Niebuhr*, Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press.

Perlas, Nicanor

- 2001 “Social Threefolding”, di dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, dalam <http://www.globenet3.org/threefold.shtml>, diakses tanggal 15 Februari 2014.
- 2001 “Tri-sector Partnerships at the United Nations: Boon or Bane?”, di dalam Nicanor Perlas, *Shaping Globalization: Civil Society, Cultural Power and Threefolding*, dalam <http://www.globenet3.org/ch15.shtml>, diakses tanggal 15 Februari 2014.

Poernomo, Soen’an Hadi

- 2013 *Berani Korupsi itu Memalukan: Bunga Rampai Filosofi, Masalah, Solusi Negeri Kelautan dan Upaya Pemberantasan Korupsi*, Depok: Imania.

Ramsey, Paul

- 1957 “The Transformation of Ethics”, di dalam Paul Ramsey (Ed.), *Faith and Ethics: The Theology of H. Richard Niebuhr*, New York: Harper & Row Publisher.

Sahetapy, J.E.

- 2014 *Kita Mengetahui, Tetapi Tidak Menyadari*, dalam Seminar Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 3 Februari 2014.

Setio, Robert

- 2012 “Sumbangan Pendidikan Kristen Bagi Perlawanan Terhadap Korupsi di Indonesia” di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana.

Singgih, Emanuel Gerrit

- 2005 *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Stassen, Glen H. dan David P. Gushee

- 2005 *Etika Kerajaan: Mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini*, Surabaya: Momentum Christian Literature.

Stueckelberger, Christoph

- 2010 *Corruption-Free Churches are Possible. Experiences, Values, Solutions*, Geneva: Globethics.net.

Tamawiwiy-Karundeng, August Corneles

- 2013 “*Mind The Gap!*: Berteologi Ekonomi Kontekstual Melalui Penafsiran Injil Lukas 16:9-13 dalam Rangka Mempertimbangkan Ulang Konteks Kemiskinan Yang Parah di Indonesia”, di dalam *Jurnal Teologi Indonesia Vol. 1 No. 1, Juli, 2013*.

Tomagola, Tamrin Amal

- 2012 “Korupsi: Puncak Krisis Peradaban Bangsa, Sebuah Upaya Pembedahan Sosiologis”, di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana.

Tridarmanto, Yusak

- 2012 “Menjalankan Fungsi Kepemimpinan Negara Berwawasan Falsafah *Hasta Brata*”, di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana.

Verkuyl, J.

- 2012 *Etika Kristen: Bagian Umum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Wibowo, A. Setyo

2010 *Arete: Hidup Sukses Menurut Platon*, Yogyakarta: Kanisius.

Widjaja, Paulus Sugeng

2010 *Character Formation and Social Transformation: An Appeal To The Indonesian Churches Amidst The So-called Chinese Problem*, Saarbrücken, Germany: VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co.

2012 “Korupsi, Nosi Moral, dan Transformasi Internal” di dalam Asnath N. Natar dan Robert Setio (Peny.), *Malunya Jadi Orang Indonesia: Menimbang Kembali Peradaban Bangsa*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen dan Universitas Kristen Duta Wacana.

“SBY: Uang Negara Dirampok”, *Kompas*, Kamis, 20 Oktober 2011.

### Website

<http://acch.kpk.go.id/statistik;jsessionid=CC436EDF7ECBC5A5022CE945EA6E3484>

<http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>

<http://kbbi.web.id/remunerasi>

<http://news.liputan6.com/read/802491/pramono-edhie-koruptor-dimiskinkan-lebih-sakit-ketimbang-mati>

<http://news.liputan6.com/read/810134/publik-pilih-hukuman-mati-untuk-koruptor>

<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/09/269583690/Debat-Capres-Prabowo-Korupsi-Karena-Gaji-Kecil>

<http://regional.kompas.com/read/2014/01/17/1737576/Ganjar-Kembalikan-Hadiah-Bernilai-Tinggi>

<http://www.jpnn.com/read/2014/06/09/239358/Korupsi-Marak,-Prabowo-Salahkan-Kecilnya-Gaji-Pejabat->

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/28/1/197737/Musni-Umar-Tawarkan-5-Solusi-Pemecahan-Korupsi>

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/14/1/216119/Berapa-pun-Nilai-Korupsinya-Koruptor-Harus-Dihukum>

<http://www.suarapembaruan.com/home/narkoba-korupsi-dan-terorisme-harus-dihukum-mati/49407>

<http://www.youtube.com/watch?v=FYO856zIkFI>

<http://www.youtube.com/watch?v=QMpxGC-Knfc>